

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Sekolah

Nama Sekolah	: SMAN 7 Banjarmasin
SSN	: 301156004004
NPSN	: 30304260
Alamat Sekolah	: Jl. Dharma Praja V No.47 Banjarmasin, 70249 Kalsel
Telp/Fax	: 0511-3253206 fax. 0511-3250016
Status Sekolah	: Negeri
SK Pendirian	: 2275/2/1973 Tanggal 16 Desember 1973
Akreditasi	: A. Nilai 96 (Unggul) Tanggal 30 September
Sekolah	2022
Website Sekolah	: http://www.sman7-bjm.sch.id
e-mail Sekolah	: Info@sman7-bjm.sch.id
NPWP Sekolah	: 00.027.640.2-731.000
Motto Sekolah	: <i>Improving Knowledge For The Excellence Of Character Building</i>

b. Sejarah Singkat Sekolah

SMA Negeri 7 Banjarmasin memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Cikal bakal sekolah ini bermula pada tahun 1973 dengan didirikannya sebuah sekolah kejuruan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2275/2/1973 tanggal 18 Desember 1973. Pada saat awal berdiri, sekolah tersebut menggunakan nama SMPP 28.

Dalam perkembangannya, SMPP 28 dinilai belum memperoleh minat yang cukup besar dari masyarakat Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut kemudian mendorong adanya perubahan status dan bentuk lembaga pendidikan. Pada tahun 1982, sekolah ini mulai diarahkan menjadi sekolah menengah umum. Perubahan tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0353/0/1985 tanggal 9 Agustus 1985, sehingga sekolah tersebut resmi berubah menjadi SMA Negeri 7 Banjarmasin.

Seiring dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan kebijakan pendidikan nasional, nomenklatur sekolah menengah umum juga mengalami penyesuaian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/1997 tanggal 7 Maret 1997, SMA Negeri 7 Banjarmasin berubah nama menjadi SMU Negeri 7 Banjarmasin.

Memasuki era otonomi daerah, perkembangan SMA Negeri 7 Banjarmasin semakin mendapat perhatian. Pada tahun 2003, Wali

Kota Banjarmasin, Drs. H. Sopian Arfan, menetapkan SMU Negeri 7 Banjarmasin sebagai sekolah plus. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 83 tanggal 6 Juni 2003 tentang pengukuhan SMU 7 Plus.

Selanjutnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nomenklatur SMU kembali disesuaikan menjadi SMA. Dengan adanya perubahan tersebut, nama SMU Negeri 7 Plus Banjarmasin kembali menjadi SMA Negeri 7 Banjarmasin.

Pada tahun 2007, SMA Negeri 7 Banjarmasin memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi salah satu Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI). Status tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran.

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2010 ketika SMA Negeri 7 Banjarmasin berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi sistem mutu. Pengakuan tersebut juga berhasil dipertahankan pada tahun 2011 sebagai bentuk keberlanjutan penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan sekolah.

Namun, pada tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan mengenai penghapusan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

(RSBI). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, SMA Negeri 7 Banjarmasin kembali berstatus sebagai sekolah reguler. Meskipun demikian, berbagai pengalaman dan perkembangan yang telah dilalui tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan SMA Negeri 7 Banjarmasin hingga menjadi salah satu lembaga pendidikan menengah di Kota Banjarmasin.

c. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang terdapat di Sman Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Visi:

Terbentuknya Peserta Didik yang Berskhak Mulia, Berkarakter, Belitrat, serta Memiliki Keterampilan yang diperlukan di Abad 21

Misi:

- 1) Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Mengembangkan Sikap Toleransi Antar Penganut Umat Beragama.
- 2) Menumbuhkan Budaya Literasi Mulai Literasi Dasar, Literasi Perpustakaan Literasi Media, Literasi Teknologi, Literasi Visual
- 3) Menyelenggarakan Pembelajaran yang Menumbuhkan Keterampilan Berkomunikasi, Berkolaborasi, Berpikir Kritis Serta Kreatif, Inovatif.
- 4) Menciptakan Lingkungan Sekolah Sehat yang Bersih,

Hijau, Hemaat, dan Aman.

- 5) Mengembangkan Sikap Jujur, Sopan Santun, Saling Menghormati, Disiplin, dan Bertanggungjawab.
- 6) Mengembangkan Potensi Siswa Sehingga Mampu Bersaing ditingkat Nasional maupun Internasional

d. Riwayat Kepemimpinan Kepala Sekolah Sman 7 Banjarmasin

Tabel 4. 1 Riwayat Kepemimpinan Kepala Sekolah

No	Nama	Masa Jabatan
1	Hamidhan, BA.	1 Juni 1975 – 23 Mei 1983
2	H. Adriani, BA	23 Mei 1983 – 1 Feb 1989
3	Drs. H. Misera Gumberl	1 Feb 1989 – 3 Sept 1994
4	Drs. H.M. Norman.	3 Sept 1994 – 27 Juli 1999
5	Drs. H. Chairil Anwar M.M	27 Juli 1999 – 23 Mar 2007
6	Drs. H. Fathurrahman Nunci, M.Pd	23 Mar 2007 – 9 Juli 2012
7	Drs. Mundofir	9 Juli 2012 – 2017
8	H. Arusalidi, M.Pd	2017 – Juni 2021
9	Tumiran, S.Pd., M.M	2022 - 1 Agustus 2023
10	Arjudin, S.Pd., M.I.Kom	2023 - Sekarang

e. Struktural Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi SMAN 7 Banjarmasin



1. Kepala Sekolah: Tugas Bertanggung jawab penuh atas seluruh penyelenggaraan pendidikan, administrasi, pembinaan personel, serta pengembangan visi dan misi sekolah.
2. Komite Sekolah: Tugas Memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memberikan dukungan finansial/material, serta melakukan pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas sekolah.
3. Kepala Urusan bagian Tata Usaha: Tugas Mengelola administrasi perkantoran, persuratan, kepegawaian, keuangan, dan mendukung kelancaran operasional sekolah secara administratif.
4. Wakil kepala Urusan Kurikulum: Tugas Menyusun kalender akademik, jadwal pelajaran, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan akademik.
5. Staf Bidang Pengajaran: Tugas Mengatur pelaksanaan KBM

harian, pembagian tugas guru, dan administrasi kelas.

6. Staf Bidang Penilaian: Tugas Mengelola administrasi ujian (PTS, PAS, US), penginputan nilai rapot, dan analisis hasil belajar siswa.
7. Staf Bidang Pengembangan SDM & Prestasi Akademik Tugas: Menyelenggarakan pelatihan guru/tenaga kependidikan serta mengoordinasikan lomba-lomba bersifat akademik.
8. Wakil kepala Urusan Kesiswaan: Tugas Menyusun program kerja kesiswaan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan kesiswaan secara keseluruhan.
9. Staf Bidang Pembina OSIS: Tugas Membimbing organisasi siswa (OSIS/MPK) dalam merancang dan melaksanakan program kerja sekolah.
10. Staf Bidang Koordinator Ekstrakurikuler: Tugas Mengatur dan memantau jalannya berbagai kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran resmi.
11. Staf Bidang Ketertiban & Keamanan: Tugas: Menegakkan tata tertib sekolah, memantau kedisiplinan siswa, dan menjaga keamanan lingkungan sekolah.
12. Wakil kepala Urusan Sarana dan prasarana: Tugas: Merencanakan pengadaan, perbaikan, dan pengembangan fasilitas sarana prasarana sekolah.
13. Staf Bidang Administrasi Inventaris & Aset: Tugas: Melakukan pendataan seluruh barang milik sekolah, pelabelan aset, dan

pelaporan berkala.

14. Staf Bidang Kerumahtanggaan: Tugas: Mengelola kebutuhan harian sekolah (listrik, air, kebersihan gedung, dan perlengkapan kantor).
15. Staf Bidang Pemeliharaan & Keasrian Lingkungan: Tugas: Memastikan lingkungan sekolah tetap hijau (taman), bersih, dan terawat secara fisik.
16. Wakil kepala Urusan Humas: Tugas: Menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, instansi luar, alumni, serta mengelola publikasi sekolah.
17. Staf Bidang Humas: Tugas: Membantu dokumentasi kegiatan, pengelolaan media sosial, dan penyebaran informasi sekolah ke masyarakat.
18. Koordinator Bimbingan Konseling: Tugas: Mengoordinasikan layanan bimbingan psikologis, konsultasi masalah siswa, serta arahan studi lanjut.
19. Guru: Tugas: Melaksanakan pembelajaran tatap muka, melakukan evaluasi, serta memberikan bimbingan sesuai mata pelajaran masing-masing.
20. Siswa: Tugas: Mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar dan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah.

2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

a. Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025/2026

Tabel 4. 2 Data Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025/2026

No	Pangkat / Golongan / Status	Jumlah Guru
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	10
2	Pembina Tk. I (IV/b)	7
3	Pembina (IV/a)	1
4	Penata Tk. I (III/d)	8
5	Penata (III/c)	6
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
7	Golongan IX (PPPK)	23
8	Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi	11
9	Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah	5
	TOTAL KESELURUHAN GURU	73

b. Keadaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2025/2026

Data peserta didik diperoleh dari staff tata usaha di SMAN 7

Banjarmasin dengan keterangan data sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Data Jumlah Siswa Tahun Ajar 2025/2026

Kt	Kelas			Total
	X (A-L)	XI (1-11)	XII (1-12)	1274
	431	392	451	
Lk	204	187	199	
Pr	227	205	252	

c. Sarana dan Prasarana di SMAN 7 Banjarmasin

Data terkait rekapitulasi sarana dan prasarana diperoleh dari staff tata usaha di SMAN 7 Banjarmasin dengan keterangan data sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Jumlah Barang, Sarana dan Parasarana

No.	Jenis Ruang	Jumlah (baik)
1	Ruang Teori Sekolah	34
2	Laboratorium Sains	3
3	Ruang Perpustakaan	1
4	Ruang Komputer	4
5	Ruang Serba Guna (Aula)	1
6	Ruang UKS	1
7	Koperasi Siswa	1
8	Ruang BK/BP	1
9	Ruang Kepala Sekolah	1
10	Ruang Guru	1
11	Ruang Tata Usaha (TAS)	1
12	Ruang Osis	1
13	Ruang Tamu	1
14	Kamar mandi/WC Guru	5
15	Kamar mandi/WC Murid	33
16	Gudang	1
17	Ruang Ibadah	1
18	Gardu Jaga	3
19	Lab.Bahasa	1
20	Ruang Wakil Kep Sek	1
21	Rumah Dinas Guru	0

22	Ruang Penjaga Sekolah	0
23	Kantin Sekolah	6
24	ruang seni/band	1
25	Ruang Komputer	1
26	Ruang Komputer/Multimedia	1
27	Ruang Olahraga	1
	JUMLAH (Tercetak di Dokumen)	97

B. Penyajian Data

1. Kegiatan Keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah menunjukkan adanya upaya yang terencana untuk menanamkan nilai-nilai religius ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah literasi keagamaan pada pagi hari, yaitu sekitar pukul 07.30–07.45 WITA sebelum proses pembelajaran dimulai. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan tersebut dipandu secara terpusat melalui mikrofon yang berada di ruang CCTV dan tersambung ke seluruh ruang kelas. Kondisi tersebut menciptakan suasana yang tenang dan kondusif sehingga peserta didik dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan aktivitas keagamaan. Pelaksanaan secara rutin tersebut menunjukkan adanya penerapan pendidikan karakter melalui pembiasaan, yaitu proses penanaman nilai religius melalui kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan berulang.

Pelaksanaan literasi keagamaan juga menunjukkan adanya perhatian

terhadap keberagaman agama yang dianut oleh peserta didik. Ketika peserta didik beragama Islam melaksanakan pembacaan Al-Qur'an, peserta didik yang beragama lain diberikan kesempatan untuk membaca kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan keterangan seorang siswa kelas XII IPA, M.A yang menyatakan:

“Setiap hari Selasa sampai Kamis terdapat kegiatan literasi; siswa Muslim membaca Al-Qur'an, sementara siswa non-muslim beribadah di ruang agama masing-masing.”³¹

Bapak Said Hafizi selaku salah satu guru agama juga memperjelas dengan mengatakan:

“Setiap hari pukul 07.30 - 07.45 (15 menit sebelum belajar), dilaksanakan literasi Al-Qur'an”³²

Kegiatan literasi dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Kamis dan diikuti oleh seluruh peserta didik. Peserta didik non-Muslim dapat menggunakan ruang keagamaan yang telah disediakan oleh sekolah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan tidak diarahkan hanya untuk kepentingan kelompok mayoritas, tetapi juga memberikan ruang kepada peserta didik dari kelompok minoritas untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya masing-masing.

Selain literasi keagamaan, sekolah juga melaksanakan kegiatan Jumat Takwa sebagai salah satu program keagamaan mingguan. M.A menerangkan seorang siswa muslim kelas XII IPA:

³¹ Hasil Wawancara bersama Siswa M.A di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

³² Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pembagian tempat berdasarkan kebutuhan ibadah masing-masing agama. Peserta didik Muslim melaksanakan kegiatan keagamaan di lapangan atau aula, sedangkan peserta didik Kristen, Katolik, dan Buddha diarahkan menuju ruangan yang telah disediakan, seperti ruang serbaguna atau laboratorium. MJ kelas XII IPS, ia salah seorang siswa Kristen, menyampaikan:

“Terdapat ruangan khusus untuk agama Hindu, Buddha, dan Kristen”³³

JP siswa kelas XI IPA yang beragama Budha menerangkan:

“Ada tersedia ruangan khusus biasanya untuk kami yang beragama Katolik, Kristen, dan Buddha.”³⁴

Bapak Rian selaku Staff K3 juga memperkuat:

“Berbeda dengan siswa Muslim yang membaca Al-Qur'an, siswa non-muslim membaca Alkitab/kitab suci di ruangan khusus agama masing-masing (ruang agama Kristen, ruang agama Katolik, dan ruang agama Buddha)”³⁵

Hasil wawancara tersebut memaparkan bahwa, ketersediaan ruangan tersebut memberikan kemudahan bagi peserta didik non-Muslim untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk akomodasi keagamaan melalui penyediaan fasilitas yang memungkinkan setiap peserta didik menjalankan keyakinannya tanpa harus meninggalkan lingkungan

³³ Hasil Wawancara bersama Siswa MJ di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

³⁴ Hasil Wawancara bersama Siswi JP di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

³⁵ Hasil Wawancara bersama Staff K3 Bapak Rian di SMAN 7 Banjarmasin, Selasa 22 September 2026

sekolah.

Meskipun demikian, hasil wawancara lain menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas keagamaan belum sepenuhnya merata bagi seluruh kelompok agama. Peserta didik beragama Hindu, seperti NC, sebagaimana yang disampikan olehnya:

“Bagi siswa yang beragama Hindu dapat melakukan literasi mandiri (membaca Bhagavad Gita).”³⁶

Berdasarkan keterangan wawancara yang dipaparkan tersebut, menyebutkan bahwa kegiatan literasi bagi siswa non muslim dapat dilakukan secara mandiri di ruang kelas atau perpustakaan. Peserta didik Hindu tetap diberikan kebebasan untuk membaca Bhagavad Gita sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan keagamaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sekolah telah memberikan kebebasan beragama, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan sumber daya dan fasilitas keagamaan yang setara bagi seluruh peserta didik.

Dalam pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan, sekolah juga menunjukkan pola keterlibatan yang bersifat lintas agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Said Hafizi

“Siswa non-Muslim yang menjadi panitia di event PHBI tetap ikut mendampingi. Panitia PHBI ini tidak selalu dipegang oleh Muslim; siswa non-Muslim bisa menjabat sebagai sekretaris atau bagian dokumen. Begitulah pelaksanaan toleransi di sana.”³⁷

³⁶ Hasil Wawancara bersama Siswi NC di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

³⁷ Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

Selaku guru agama, peserta didik non-Muslim dapat dilibatkan dalam kepanitiaan kegiatan hari besar Islam, misalnya sebagai sekretaris maupun anggota dokumentasi. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antarumat beragama di lingkungan sekolah tidak hanya diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga melalui kerja sama dalam kegiatan bersama. Dengan demikian, toleransi yang diterapkan dapat dipahami sebagai toleransi aktif karena peserta didik diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial sekolah tanpa membedakan latar belakang agamanya.

Program Pesantren Ramadan juga memperlihatkan adanya pengembangan kegiatan keagamaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pelaksanaan ritual. Pada pelaksanaannya, kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat sosial melalui dukungan terhadap pelaku UMKM di sekitar Banjarmasin Timur. Salah satu bentuknya dilakukan dengan membeli atau memborong takjil yang dijual oleh pedagang lokal. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara nilai keagamaan dengan kepedulian sosial, sehingga peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membangun kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Sr, siswi kelas XII, menjelaskan bahwa peserta didik non-Muslim tidak diwajibkan mengikuti kegiatan Pesantren Ramadan dan tetap diberikan kesempatan untuk

melaksanakan kegiatan lain secara paralel. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswi berinisial Sr menerangkan:

“Di sekolahku ada kegiatan BTA, salat berjamaah, pesantren Ramadan, sama peringatan hari-hari besar Islam. Buat siswa yang beda agama biasanya nggak diwajibkan ikut kegiatan tersebut dan tetap dihargai, jadi mereka bisa menjalankan kegiatan sesuai agamanya masing-masing.”³⁸

Dalam pelaksanaan salat berjamaah Zuhur dan Asar, sekolah juga menerapkan pendekatan yang menekankan kesadaran peserta didik. Berdasarkan keterangan Bapak Said Hafizi, sekolah tidak mengedepankan hukuman atau pemaksaan terhadap peserta didik yang tidak melaksanakan salat. Menurut beliau, pembiasaan keagamaan akan lebih efektif apabila muncul dari kesadaran pribadi daripada sekadar kepatuhan akibat adanya tekanan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya orientasi pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang perlu dibimbing untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab internal dalam menjalankan ajaran agamanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Said Hafizi beliau menerangkan:

“Sekolah tidak lagi mewajibkan salat secara paksa dengan konsekuensi hukuman, melainkan menumbuhkan kesadaran. Evaluasi menunjukkan bahwa paksaan membuat siswa beribadah bukan karena kesadaran. Dengan metode kesadaran, guru lebih mudah mengidentifikasi dan membina siswa yang memang belum memiliki rasa tanggung jawab untuk salat secara natural.”³⁹

³⁸ Hasil Wawancara bersama Siswi Sr di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

³⁹ Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

Ibu LN juga memperjelas perkataan bapak said bahwa :

“Sebenarnya kalau masalah ibadah tuh ya nafsi-nafsi ya. Kami sebagai guru agama cuma mendorong dan mengingatkan selalu kewajiban mereka. Sebelumnya memang dulu pernah sempat seperti dipaksa dulu ya dulu banget. Jadi anak-anak di sini setiap salat di masjid itu dia dikasih kartu dan kartu itu sebagai tanda bukti mereka sudah salat. Cuma ternyata hal itu enggak terlalu efektif. Kenapa? Karena ada anaknya yang buat curang. Jadi ketika mau rakaat terakhir barunya datang. Dan karena dia dianggap salat tadilah ya tadinya salat tuh mengincar kartunya itu aja gitu. Nah, supaya tidak dapat hukuman, supaya tidak dapat dari guru agamanya.”⁴⁰

Kegiatan keagamaan juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan peserta didik. Pembagian tugas dalam pelaksanaan ibadah diberikan kepada peserta didik berdasarkan kompetensi dan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Misalnya, imam berasal dari peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler Tahfiz, khatib berasal dari ekstrakurikuler pidato, sedangkan muazin berasal dari ekstrakurikuler Habsi. Pola tersebut menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan religiusitas, tetapi juga menjadi media pembentukan kepemimpinan, tanggung jawab, keberanian, dan keterampilan organisasi peserta didik.

Dalam aspek pembiayaan, sekolah juga memberikan kesempatan kepada kelompok agama yang ada untuk mengajukan kebutuhan kegiatan keagamaan melalui bidang kesiswaan. Pengajuan tersebut

⁴⁰ Hasil Wawancara bersama Ibu Pendidikan agama islam Ibu LN di SMAN 7 Banjarmasin, Selasa 22 September 2026

selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk direalisasikan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan dukungan kelembagaan terhadap kegiatan keagamaan dari berbagai kelompok agama yang berada di lingkungan sekolah.

Walaupun secara umum pelaksanaan kegiatan keagamaan berlangsung dengan baik, penelitian juga menemukan adanya pengalaman yang berbeda di antara peserta didik. DR, siswa Katolik, mengungkapkan bahwa dirinya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekolah dan tetap dapat menjalankan keyakinannya. Sementara itu, peserta didik Hindu masih menghadapi keterbatasan karena tidak tersedianya guru agama Hindu secara tetap di sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan keagamaan tertentu harus dilaksanakan di luar sekolah, termasuk kegiatan yang dikenal sebagai Sekolah Minggu, dengan biaya yang ditanggung secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip toleransi telah diterapkan, masih terdapat persoalan pemerataan pelayanan keagamaan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil wawancara dengan DR

“Tidak semua mendapatkan ruangan agama, karena ada beberapa siswa yang beragama Hindu tidak dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dikarenakan tidak ada guru yang mengajar agama Hindu dan ruang doa bagi agama Hindu.”⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara bersama Siswa DR di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

Namun demikian, pihak sekolah tetap memberikan izin terhadap siswa maupun siswi yang ingin tetap menjalankan ibadah agamanya sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rian:

“Siswa yang akan beribadah ke gereja (misalnya setengah bulan sekali) diberikan izin dengan membuat surat rekomendasi dari pihak Tata Usaha (TU) dan meminta izin kepada guru-guru”⁴²

Secara keseluruhan, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kegiatan keagamaan di sekolah dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan melibatkan seluruh warga sekolah sesuai dengan agama masing-masing. Kegiatan tersebut meliputi Literasi Kitab Suci, Jumat Takwa, PHBI, Pesantren Ramadan, serta pelaksanaan ibadah harian yang diarahkan untuk membentuk kebiasaan religius dan meningkatkan kesadaran siswa dalam menjalankan ajaran agamanya. Pelaksanaannya juga memberikan ruang bagi siswa Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu untuk menjalankan kegiatan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas bagi agama tertentu. Secara keseluruhan, kegiatan keagamaan telah menjadi bagian penting dalam pembinaan kehidupan religius siswa serta menciptakan suasana sekolah yang mendukung pelaksanaan ibadah secara tertib dan harmonis.

2. Problematika dalam Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin

⁴² Hasil Wawancara bersama Staff K3 Bapak Rian di SMAN 7 Banjarmasin, Selasa 22 September 2026

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan di sekolah tidak terlepas dari sejumlah kendala. Permasalahan yang ditemukan mencakup aspek koordinasi kepanitiaan, administrasi dan pembiayaan, sarana prasarana, keterbatasan tenaga pendidik agama tertentu, kondisi psikologis peserta didik, serta persoalan pemerataan pelayanan keagamaan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan membutuhkan dukungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pengelolaan yang efektif dari pihak sekolah.

Problematika yang cukup kompleks yang ditemukan SMAN 7 Banjarmasin adalah mengenai terbatasnya tenaga kependidikan yang bergamana non-muslim untuk mengayomi selakigus melakukan Pendidikan secara khusus di SMAN 7 Banjarmasin. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu LN

“Iya. Jadi kalau Katolik sama Buddha pun kalau enggak salah ada. Jadi kalau Hindu itu memang biasanya ada atau bahkan tidak ada gitu. Jadi mereka pun biasanya langsung ke tempat ibadah mereka langsung di luar”⁴³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa, minimnya tenaga kependidikan pada agama non-muslim terutama agama Hindu, dengan kurangnya tenaga pendidik pada salah satu agama, besar kemungkinannya berkurang pula kompetensi dan pola pembelajaran yang didapatkan oleh siswa maupun siswa terkait

⁴³ Hasil Wawancara bersama Ibu Pendidikan agama islam Ibu LN di SMAN 7 Banjarmasin, Selasa 22 September 2026

mengenai Pelajaran agama yang dianutnya selama di lingkungan pembelajaran di SMAN 7 Banjarmasin. Hal ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu dibenahi bagi seluruh pihak guru, maupun jajaran staff di SMAN 7 Banjarmasin.

Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah terkait koordinasi internal dalam kepanitiaan siswa. Bapak Said Hafizi menjelaskan bahwa pada jenjang SMA siswa diberikan ruang yang cukup besar untuk mengelola kegiatan secara mandiri, yaitu sekitar 75 persen. Tingkat kemandirian tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengelola kegiatan, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan oleh guru. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan di lapangan terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ruang otonomi siswa, semakin diperlukan pula mekanisme komunikasi, pengarahan, dan pengawasan yang jelas agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Said Hafizi:

“Untuk kendala kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) sebenarnya banyak faktornya, ada internal dan eksternal. Faktor internal terkait kepanitiaan. Pola di SMA berbeda dengan SMP; jika di SMP guru memegang kendali 50%, di SMA siswa bergerak 75% dan guru hanya mengarahkan 25%. Terkadang apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai harapan, tergantung daya tangkap panitia saat koordinasi.”⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

Kendala berikutnya berkaitan dengan administrasi dan pembiayaan kegiatan. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mengikuti ketentuan administratif yang telah ditetapkan sehingga tidak seluruh kebutuhan kegiatan dapat dipenuhi secara langsung. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, siswa dituntut untuk lebih kreatif dalam memperoleh dukungan pembiayaan, misalnya melalui donatur atau dana komite. Keadaan ini menyebabkan beberapa gagasan kegiatan yang bersifat spontan terkadang membutuhkan proses lebih panjang untuk dapat direalisasikan. Dengan demikian, aspek administratif menjadi salah satu faktor yang memengaruhi fleksibilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan di sekolah.

Aspek sarana dan prasarana juga menjadi salah satu hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan. KP menyampaikan bahwa kualitas sound system masih menjadi kendala, terutama ketika kegiatan melibatkan banyak peserta di ruang terbuka. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang berpusat di lapangan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas penyampaian materi keagamaan, seperti ceramah atau pengajaran, sehingga peserta didik tidak selalu memperoleh pengalaman kegiatan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan KP siswa kelas XII IPS menyampaikan:

“Kendala biasanya terjadi itu faktor cuaca dan sound sistem nya, dan sebelum melaksanakan kegiatan keagamaan dapat

melihat ramalan cuaca terlebih dahulu dan untuk sound sistem dapat mengganti ke yang baru.”⁴⁵

Kendala yang lebih kompleks ditemukan pada peserta didik yang berasal dari kelompok agama minoritas, khususnya peserta didik Hindu. NC menjelaskan bahwa keterbatasan guru agama Hindu dan belum tersedianya fasilitas keagamaan yang permanen menyebabkan dirinya harus melaksanakan kegiatan keagamaan tertentu di luar lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi pura untuk mengikuti kegiatan yang disebut sebagai Sekolah Minggu. Kondisi tersebut membutuhkan waktu dan biaya pribadi serta mengurangi waktu istirahat siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah peserta didik dari suatu kelompok agama dapat berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar pelayanan pendidikan agama tetap dapat diberikan secara proporsional. Berdasarkan hasil wawancara dengan NC menceritakan:

“Merasa ada perbedaan kesempatan dibandingkan siswa Muslim atau Kristen karena tidak adanya fasilitas sekolah untuk agama Hindu. kami harus pergi ke Pura untuk "Sekolah Minggu" dengan biaya sendiri.”⁴⁶

Selain faktor kelembagaan, penelitian juga menemukan adanya kendala yang berasal dari diri peserta didik. MJ mengungkapkan bahwa dalam interaksi antarsiswa terkadang muncul perbedaan pandangan mengenai ajaran dan kebenaran agama masing-masing. Apabila

⁴⁵ Hasil Wawancara bersama Siswa KP di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

⁴⁶ Hasil Wawancara bersama Siswi NC di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

perbedaan tersebut tidak disikapi dengan baik, dapat muncul keraguan atau berkurangnya rasa percaya dalam hubungan antarsiswa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman mengenai toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, sehingga perbedaan teologis tidak berkembang menjadi konflik interpersonal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MJ

“Kendala berasal dari faktor internal diri sendiri, seperti adanya keraguan atau perbedaan pandangan mengenai kebenaran kitab suci antaragama yang bisa memicu kurangnya rasa percaya satu sama lain.”⁴⁷

Persoalan lainnya berkaitan dengan fasilitas pendukung dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, khususnya kantin. Peserta didik Hindu mengalami kesulitan ketika harus memastikan jenis makanan yang tersedia karena belum terdapat informasi atau label yang memadai mengenai kandungan bahan makanan yang dijual. Bagi peserta didik dengan aturan makanan tertentu berdasarkan keyakinannya, informasi tersebut merupakan kebutuhan penting. Hal ini memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap keberagaman agama tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah, tetapi juga perlu diwujudkan dalam fasilitas dan pelayanan sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan peserta didik.

Dari sisi kepanitiaan, kepadatan agenda kegiatan juga menjadi salah satu kendala. Shira menjelaskan bahwa beberapa kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan sehingga siswa harus mengatur waktu

⁴⁷ Hasil Wawancara bersama Siswa MJ di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

secara lebih ketat antara kegiatan organisasi, keagamaan, dan kewajiban akademik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan jadwal yang lebih terkoordinasi. Pengelolaan waktu yang kurang baik berpotensi menimbulkan kelelahan pada peserta didik dan pada akhirnya dapat memengaruhi motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan SH

“Kalau aku pribadi nggak ada kendala yang berarti. Paling kadang jadwal kegiatan cukup padat, jadi harus bisa ngatur waktu. Sejauh yang aku lihat, hubungan antar siswa yang beda agama juga baik-baik aja.”⁴⁸

Permasalahan koordinasi juga dirasakan oleh kelompok agama minoritas. Ketiadaan guru agama tetap menyebabkan peserta didik dari kelompok tertentu tidak memiliki pendamping yang dapat secara intensif mengkomunikasikan kebutuhan mereka kepada pihak sekolah. Koordinator yang tersedia belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi tersebut secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme representasi yang lebih efektif agar aspirasi kelompok minoritas dapat tersampaikan dan memperoleh tindak lanjut dari pihak sekolah.

Selain persoalan koordinasi, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan peringatan hari besar agama selain Islam masih relatif terbatas. JP menjelaskan bahwa kegiatan hari besar agamanya tidak selalu dilaksanakan secara rutin dan pada beberapa kesempatan harus diajukan terlebih dahulu oleh siswa. Kondisi tersebut menunjukkan

⁴⁸ Hasil Wawancara bersama Siswi SH di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

bahwa inisiatif penyelenggaraan kegiatan keagamaan kelompok minoritas masih lebih banyak berasal dari siswa dibandingkan dari pihak sekolah. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif agar keberadaan kelompok agama minoritas tidak hanya memperoleh toleransi, tetapi juga memperoleh pengakuan dan ruang partisipasi yang proporsional dalam kehidupan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan JP:

“Kegiatan untuk hari besar agama (selain Islam) jarang dilaksanakan kecuali siswa mengajukan permintaan sendiri.”⁴⁹

Penelitian juga menemukan adanya persoalan perilaku individual yang berpotensi mengganggu hubungan antarumat beragama. NC menyampaikan bahwa meskipun secara umum lingkungan sekolah cukup toleran, masih terdapat beberapa individu yang menunjukkan sikap kurang menyenangkan atau bernuansa diskriminatif terhadap dirinya. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembentukan karakter toleran tidak cukup dilakukan melalui kegiatan keagamaan secara kolektif, tetapi juga memerlukan pembinaan pada tingkat individu. Sekolah perlu memberikan penguatan pendidikan karakter sekaligus menerapkan aturan yang jelas terhadap tindakan diskriminatif agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh peserta didik.

Dengan demikian, problematika kegiatan keagamaan di sekolah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu koordinasi

⁴⁹ Hasil Wawancara bersama Siswi JP di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

internal, administrasi dan pembiayaan, sarana prasarana, keterbatasan tenaga pendidik agama, pemerataan fasilitas, pengelolaan jadwal, representasi kelompok minoritas, serta perilaku diskriminatif individu. Kendala tersebut tidak menunjukkan kegagalan keseluruhan program keagamaan, tetapi menjadi indikator bahwa pelaksanaan kegiatan masih membutuhkan penyempurnaan dalam aspek manajemen, pelayanan, dan perlindungan terhadap keberagaman peserta didik.

3. Upaya Penyelesaian Problematika Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, peneliti mengidentifikasi berbagai solusi strategis yang telah diimplementasikan maupun yang diusulkan oleh para informan untuk mengoptimalkan kegiatan keagamaan di sekolah. Salah satu solusi fundamental yang diterapkan oleh pihak sekolah, khususnya dalam mengatasi kendala kedisiplinan ibadah, adalah transisi metode dari paksaan menuju penumbuhan kesadaran internal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Said Hafizi:

“Dengan metode kesadaran, guru lebih mudah mengidentifikasi dan membina siswa yang memang belum memiliki rasa tanggung jawab untuk shalat secara natural.”⁵⁰

Ibu LN juga memperjelas perkataan bapak said bahwa :

“Jadi dengan metode tersebut bukan tadi sebagai penekanan ya, bukan berarti kami sebagai guru agama membiarkan atau tidak membolehkan. Ya, bukan seperti itu. Tapi ya tadi kami

⁵⁰ Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

selalu mengingatkan dan juga mendorong mereka atau bahkan kalau kami ketemu kami selalu bertanya sudahkah shalatnya gitu. Kalau mereka jujur ya alhamdulillah kalau mereka berbohong itu tanggungan mereka masing-masing gitu.”⁵¹

Bapak Said Hafizi menegaskan bahwa menghapuskan konsekuensi hukuman dalam ibadah salat harian merupakan solusi jangka panjang agar siswa beribadah atas dasar tanggung jawab pribadi, bukan karena takut. Pendekatan ini secara tidak langsung dapat menimbulkan perubahan perilaku yang menetap bagi individu agar memahami bahwa ibadah menjadi salah satu aspek otonomi tersendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Adapaun dalam mengatasi hambatan manajerial pada kegiatan besar (PHBI), solusi yang diterapkan adalah melalui intervensi langsung dan pendampingan intensif dari guru agama. Sebagaimana yang diutarakan kembali oleh Bapak Said Hafizi:

“Jika siswa tidak mampu mengoordinir peserta, guru akan turun tangan melakukan intervensi langsung, meskipun harapannya ada proses pembelajaran bagi siswa dalam menangani acara.”⁵²

Bapak Said Hafizi menegaskan serta mengingat terkait pola organisasi di tingkat SMA memberikan porsi 75% gerak kepada siswa, guru berperan sebagai pengawas yang siap turun tangan jika koordinasi lapangan mengalami miskomunikasi. Upaya ini dipandang sebagai solusi edukatif agar siswa tetap mendapatkan proses pembelajaran

⁵¹ Hasil Wawancara bersama Ibu Pendidikan agama islam Ibu LN di SMAN 7 Banjarmasin, Selasa 22 September 2026

⁵² Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

dalam menangani acara meskipun terjadi kendala teknis. Hal ini merupakan bentuk solusi dari pihak sekolah di mana guru menyesuaikan tingkat instruksi berdasarkan kemampuan dan kemandirian panitia siswa di lapangan.

Adapun solusi terkait problematika finansial, terutama terkait keterbatasan dana operasional (BOS), dilakukan melalui diversifikasi sumber pendanaan. Bapak Said Hafizi:

“Terkait laporan administrasi dengan standar baku sekolah, seperti penggunaan dana BOS. Jika dana BOS terbatas, siswa harus mencari solusi melalui dana komite atau mencari donatur.”⁵³

Bapak Said Hafizi mengungkapkan bahwa sekolah mendorong panitia siswa untuk mencari solusi kreatif melalui dana komite atau bantuan donatur eksternal jika anggaran sekolah tidak mencukupi. Langkah ini merupakan strategi yang mengajarkan kepada para siswa yang tidak hanya menyelesaikan hambatan biaya tetapi juga melatih kemampuan kewirausahaan dan diplomasi siswa dalam mencari sponsor kegiatan keagamaan.

Untuk menjamin keadilan bagi seluruh pemeluk agama, sekolah menerapkan mekanisme pengajuan anggaran yang setara melalui kesiswaan. Solusinya, setiap penganut agama diberikan kesempatan untuk merancang dan mengajukan rencana anggaran kegiatan mereka

⁵³ Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

setahun sebelumnya agar dapat direalisasikan dalam RKAS.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Said Hafizi:

“Semua agama diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan anggaran kegiatan melalui kesiswaan agar dapat direalisasikan di tahun berikutnya. Semua terayomi selama mengajukan anggaran pelaksanaan.”⁵⁴

Hal ini menunjukkan adanya upaya Keadilan Distributif dalam manajemen sekolah, di mana sumber daya dialokasikan secara proporsional untuk mendukung kebutuhan spiritual seluruh siswa tanpa terkecuali.

Terkait pelaksanaan kegiatan rutin bagi minoritas, sekolah memberikan solusi berupa penyediaan ruang-ruang khusus untuk ibadah paralel. Saat siswa Muslim melaksanakan rutin Jumat Takwa, siswa Kristen diarahkan ke ruang serbaguna, sementara siswa Katolik dan Buddha menuju laboratorium atau ruangan lain yang telah ditentukan. Solusi spasial ini sangat penting untuk menciptakan Lingkungan Belajar yang Inklusif, di mana setiap siswa merasa memiliki tempat yang aman untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa merasa terganggu oleh mayoritas.

Namun, menanggapi aspirasi siswa minoritas seperti NC seorang siswi yang beragama Hindu:

“Berharap disediakan sarana prasarana (ruangan) khusus untuk kegiatan keagamaan Hindu meskipun jumlah siswanya sangat sedikit (hanya sekitar 4 orang per angkatan). Meskipun ada oknum rasis secara individu, secara umum lingkungan sekolah dinilai sudah cukup terbuka dan

⁵⁴ Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

toleran.”⁵⁵

Kemudian DR siswa yang beragama Katolik juga mengatakan:

“Berharap pihak sekolah dapat menyediakan tempat ibadah sesuai kepercayaan masing masing siswa”⁵⁶

Penyediaan sarana prasarana yang lebih representatif tetap menjadi poin solusi utama yang diusulkan. Berdasarkan keresahan yang disampaikan oleh NC dan DR agar sekolah tetap mengalokasikan satu ruangan khusus bagi siswa Hindu meskipun jumlah pengikutnya sangat sedikit, agar mereka tidak perlu lagi melakukan literasi di perpustakaan. Solusi fisik ini dianggap sebagai simbol pengakuan eksistensi minoritas di lingkungan sekolah (*Recognition*).

Dari sisi teknis, KP (Siswa Buddha) memberikan solusi pragmatis terkait kendala infrastruktur penunjang ibadah. Ia menyarankan agar sekolah melakukan pembaruan pada sistem suara (*sound system*) dan rutin memantau ramalan cuaca sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan terbuka. Sebagaimana yang disampaikannya:

”Kendala cuaca dan sound sistem nya, dapat melihat ramalan cuaca terlebih dahulu dan untuk sound sistem dapat mengganti ke yang baru.”⁵⁷

Solusi teknis ini sangat krusial untuk menjaga Kenyamanan Beribadah, karena kualitas suara yang jernih dan persiapan terhadap faktor alam akan meningkatkan kekhusyukan siswa dalam menyerap

⁵⁵ Hasil Wawancara bersama Siswi NC di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

⁵⁶ Hasil Wawancara bersama Siswa DR di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

⁵⁷ Hasil Wawancara bersama Siswa KP di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

pesan-pesan moral dari ceramah keagamaan.

Dalam aspek pengambilan kebijakan, MA (Siswa Islam) mengusulkan solusi berupa penguatan partisipasi aktif siswa minoritas dalam proses perencanaan. MA menyampaikan:

“Menyarankan agar sekolah bisa lebih banyak mengambil opini dan saran dari siswa-siswa yang beragama lain.”⁵⁸

Ia menyarankan agar sekolah lebih banyak menyerap opini dan saran dari siswa lintas agama sebelum sebuah kegiatan diputuskan. Secara teoritis, solusi ini mendukung model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang inklusif, di mana pengambilan keputusan melibatkan aspirasi dari seluruh elemen pemangku kepentingan untuk meminimalkan potensi ketidakpuasan.

Solusi atas tantangan keberagaman hari besar keagamaan muncul dari keinginan JP (Buddha) agar sekolah memfasilitasi peringatan hari besar semua agama secara berkala. JP mengatakan:

“Menginginkan agar hari-hari besar agamanya juga bisa diperingati dengan kegiatan di sekolah. Sebelumnya pernah diadakan kegiatan bimbingan dengan kunjungan ke Wihara bagi siswa Buddha.”⁵⁹

Ia mencontohkan solusi yang pernah dilakukan melalui kegiatan bimbingan kunjungan ke Wihara sebagai model kegiatan luar sekolah yang efektif. Strategi *Outdoor Education* berbasis religi ini dapat menjadi solusi untuk memperluas cakrawala siswa sekaligus memberikan penghargaan terhadap hari besar agama minoritas agar

⁵⁸ Hasil Wawancara bersama Siswa MA di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

⁵⁹ Hasil Wawancara bersama Siswi JP di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

tidak hanya terpusat pada kegiatan Islam saja.

Untuk mengatasi problematika internal seperti keraguan atau prasangka antar-keyakinan, MJ (Siswa Kristen) sebelumnya ia berpendapat:

“Kendala berasal dari faktor internal diri sendiri, seperti adanya keraguan atau perbedaan pandangan mengenai kebenaran kitab suci antaragama yang bisa memicu kurangnya rasa percaya satu sama lain.”⁶⁰

Seiring berjalannya waktu ia merubah pendapatnya dan memandang bahwa penguatan budaya toleransi yang sudah berjalan saat ini adalah solusi terbaik. Ia mengatakan:

“Merasa kondisi saat ini sudah pas dan tidak ada problematika besar karena toleransi dan rasa menghargai di sekolah sudah kuat.”⁶¹

Ia menekankan bahwa rasa saling menghargai yang kuat antar-individu menjadi benteng alami untuk meredam potensi konflik. Secara sosiologis, ini sejalan dengan konsep Kohesi Sosial, di mana interaksi positif sehari-hari menjadi obat bagi ketidakpercayaan teologis.

Shira (Siswa Islam) menambahkan solusi preventif melalui pengingat berkelanjutan (*continuous reminder*). Ia menyarankan agar dalam setiap momentum kegiatan keagamaan, sekolah selalu menyisipkan pesan untuk saling menghormati. SH menyampaikan:

“Menurutku sekolah perlu terus menjaga sikap saling menghormati antar siswa. Selain itu, kalau ada kegiatan keagamaan, semua siswa bisa diingatkan untuk saling menghargai supaya suasana di sekolah tetap nyaman buat

⁶⁰ Hasil Wawancara bersama Siswa MJ di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

⁶¹ Hasil Wawancara bersama Siswa MJ di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

semua.”⁶²

Upaya komunikasi persuasif ini dipandang efektif untuk menjaga atmosfer sekolah tetap nyaman bagi semua orang, terutama ketika jadwal kegiatan sedang padat yang seringkali memicu kelelahan dan penurunan emosi.

Dalam struktur organisasi, pembentukan Sekbit 1 di bawah OSIS menjadi solusi koordinasi lintas iman. Bapak Said Hafizi mengatakan:

“Dibawah OSIS terdapat Sekbit 1 yang memiliki koordinator sebagai pengarah event keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Buddha).”⁶³

Keberadaan koordinator dari berbagai agama yang duduk bersama dalam satu payung organisasi memudahkan sinkronisasi kegiatan. Ini merupakan implementasi guna menjalin Kolaborasi Lintas Fungsi, di mana perbedaan latar belakang disatukan dalam satu tujuan program kerja sekolah yang harmonis.

Mengenai tantangan ketiadaan guru agama Hindu, solusi jangka pendek yang harus dilakukan adalah penguatan peran koordinator yang sudah ada agar lebih maksimal dalam menjembatani kebutuhan administratif siswa. Meskipun saat ini siswa Hindu harus mencari solusi mandiri dengan mengikuti "Sekolah Minggu" di luar sekolah, dukungan kebijakan sekolah dalam mengakui hasil belajar tersebut merupakan solusi birokratis yang penting bagi kemajuan akademik siswa.

⁶² Hasil Wawancara bersama Siswi SH di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 7 Agustus 2026

⁶³ Hasil Wawancara bersama Guru Pendidikan Agama Bapak Said Hafizi, S.Pd.I di SMAN 7 Banjarmasin, Jumat 13 Maret 2026

Dalam kegiatan Pesantren Ramadan, transformasi konsep dari sekadar bagi-bagi sembako menjadi pemberdayaan UMKM lokal merupakan solusi inovatif untuk mengajarkan empati sosial. Bapak Said Hafizi menjelaskan bahwa dengan mendorong dagangan pedagang kecil di sekitar sekolah, siswa belajar bahwa ibadah memiliki dimensi ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Solusi ini relevan dengan maksud mengembangkan Pendidikan Karakter Berbasis Pengabdian Masyarakat.

Untuk kenyamanan beribadah massal, pembagian zonasi area shalat (Lantai 1 untuk laki-laki dan Lantai 2 untuk perempuan) menjadi solusi bagi siswa perempuan untuk tetap dapat berpartisipasi dalam salat Jumat secara nyaman. Solusi pengaturan ruang ini memastikan semua penganut Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan hak ibadah yang sama dalam fasilitas sekolah.

Sebagai upaya menutup celah *bullying* atau diskriminasi, lingkungan sekolah yang terbuka dan toleran merupakan solusi makro yang harus terus dipelihara. NC mengakui bahwa meskipun ada oknum individu yang rasis, sistem sekolah yang terbuka menjadi tempat berlindung yang baik bagi siswa minoritas. Peneliti menyimpulkan bahwa Budaya Sekolah (*School Culture*) yang sehat adalah solusi pamungkas bagi segala problematika keberagaman.

Secara keseluruhan, beragam upaya dan solusi ini menunjukkan komitmen sekolah untuk terus melakukan perbaikan (*continuous*

improvement). Sekolah tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi proaktif dalam mendengarkan aspirasi siswa dari berbagai latar belakang keyakinan. Sinergi antara kebijakan guru dan usulan siswa menjadi kunci utama dalam mewujudkan moderasi beragama yang substantif di lingkungan pendidikan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin

Selama melaksanakan penelitian di SMAN 7 Banjarmasin, peneliti menemukan adanya suasana religius yang kuat, tetapi tetap menunjukkan karakter inklusif dalam kehidupan sekolah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari visi sekolah yang diarahkan pada pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia sekaligus memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan abad ke-21. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah merupakan bentuk konkret dari kegiatan yang dirancang secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan keagamaan tidak hanya ditempatkan sebagai aktivitas tambahan, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Salah satu bentuk kegiatan yang paling terlihat adalah pelaksanaan literasi keagamaan setiap pagi sekitar pukul 07.30 WITA. Pada waktu tersebut, seluruh aktivitas sekolah diarahkan untuk memberikan kesempatan

kepada peserta didik melaksanakan kegiatan keagamaan masing-masing. Lantunan ayat suci, doa, dan bacaan keagamaan disampaikan melalui mikrofon yang terhubung dari ruang CCTV sehingga dapat terdengar di berbagai ruang kelas. Berdasarkan pengamatan peneliti, kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari rutinitas sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, kegiatan ini tidak dapat dipandang hanya sebagai rutinitas formal, karena di dalamnya terdapat proses pembiasaan nilai-nilai religius yang diarahkan untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, keteraturan, dan kesadaran peserta didik dalam menjalankan kewajiban keagamaannya.

Hal menarik lainnya ditemukan pada cara sekolah mengelola keberagaman agama dalam pelaksanaan literasi keagamaan. Peserta didik Muslim diberikan kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, sedangkan peserta didik yang beragama lain memperoleh ruang dan kesempatan untuk membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak diarahkan pada penyeragaman praktik keagamaan, tetapi memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk menjalankan keyakinannya secara proporsional. Pola tersebut memperlihatkan adanya upaya sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman sekaligus menjaga agar kegiatan keagamaan dapat berlangsung secara tertib dan terarah.

Temuan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan MA yang menjelaskan bahwa sekolah menyediakan ruang-ruang keagamaan pada

hari Selasa hingga Kamis bagi peserta didik beragama Kristen, Katolik, dan Buddha untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara lebih tenang dan terarah. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya memberikan pengakuan secara normatif terhadap keberagaman agama, tetapi juga berupaya memberikan dukungan secara praktis melalui penyediaan ruang dan pengaturan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin memiliki dimensi toleransi yang cukup kuat, karena setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjalankan praktik keagamaannya tanpa harus menghilangkan identitas keagamaan masing-masing.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin dapat dipahami sebagai salah satu instrumen pembentukan karakter sekaligus sarana pendidikan toleransi. Interaksi antarpeserta didik yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda berlangsung dalam satu lingkungan pendidikan yang sama, tetapi tetap memberikan ruang terhadap perbedaan praktik keagamaan. Dengan demikian, nilai toleransi tidak hanya disampaikan melalui pembelajaran secara teoritis, melainkan dipraktikkan melalui pengelolaan kegiatan sehari-hari. Kejadian ini sejalan dengan pandangan Muhamad pada jurnalnya yang menegaskan bahwa kegiatan keagamaan di sekolah memegang peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai karakter penting, seperti kedisiplinan, rasa hormat, toleransi, dan empati, guna menciptakan keseimbangan antara aspek akademik dan non-akademik. Hal inilah yang memperlihatkan bahwa

kegiatan keagamaan di sekolah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan aspek religiusitas individu, yaitu turut membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan dan menciptakan kehidupan sekolah yang harmonis.

Dari sisi kebaruan penelitian, temuan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan penelitian Indah Fahira⁶⁴ yang lebih berfokus pada pengembangan lingkungan religius melalui kegiatan Rohis dalam kondisi pembelajaran pada masa pandemi. Penelitian tersebut lebih banyak berhadapan dengan persoalan pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam situasi pembelajaran jarak jauh dan keterbatasan interaksi secara langsung. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di SMAN 7 Banjarmasin memiliki ruang lingkup yang lebih kompleks karena mengkaji pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam lingkungan sekolah yang bersifat multireligius. Keberadaan peserta didik dari berbagai latar belakang agama menuntut adanya pengelolaan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan religiusitas, tetapi juga pada penghormatan terhadap keberagaman dan pemenuhan hak peserta didik dalam menjalankan keyakinannya.

Perbedaan tersebut semakin terlihat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan secara langsung di lingkungan sekolah. Apabila penelitian Fahira lebih menitikberatkan pada persoalan pembentukan lingkungan

⁶⁴ Indah Fahira, "Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Rohani Islam dalam Upaya Mengembangkan Lingkungan Pendidikan yang Religius di SMA Negeri 1 Ampibabo" (Skripsi, IAIN Palu, 2020).

religius dalam situasi pandemi dan keterbatasan interaksi melalui media daring seperti Zoom, penelitian ini menemukan persoalan yang berbeda, yaitu bagaimana sekolah mengharmonisasikan praktik keagamaan yang beragam dalam ruang pendidikan yang sama. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan, tetapi juga menyangkut pengaturan waktu, fasilitas, ruang ibadah, koordinasi antarpihak, serta penciptaan suasana yang memungkinkan setiap peserta didik melaksanakan kegiatan keagamaannya secara nyaman. Dalam konteks ini, pelaksanaan kegiatan Jumat Takwa secara paralel bagi peserta didik dari agama yang berbeda menjadi salah satu gambaran mengenai upaya sekolah dalam mengelola keberagaman tersebut.

Selain aspek keberagaman agama, kebaruan penelitian juga terlihat pada temuan mengenai tingkat keterlibatan dan kemandirian peserta didik. Jika dibandingkan dengan penelitian Risnawati⁶⁵ yang menemukan adanya problematika berupa rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan keagamaan, hasil penelitian di SMAN 7 Banjarmasin menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peserta didik menunjukkan antusiasme yang relatif tinggi karena sekolah memberikan ruang yang cukup besar bagi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan kegiatan. Tingkat kemandirian peserta didik yang mencapai sekitar (75%) menunjukkan bahwa mereka tidak hanya

⁶⁵ Risnawati, Muslimah, dan Surawan, "Problematika Pembinaan Keagamaan Siswa di SMP Negeri 8 Palangkaraya," *KUTTAB: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2025)

ditempatkan sebagai objek kegiatan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berperan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan keagamaan.

Temuan tersebut memberikan pemahaman bahwa persoalan pelaksanaan kegiatan keagamaan pada jenjang SMA tidak selalu berada pada rendahnya minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan. Dalam konteks SMAN 7 Banjarmasin, tantangan yang lebih menonjol justru berkaitan dengan bagaimana sekolah mengarahkan antusiasme, kreativitas, dan kemandirian peserta didik agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang hendak dibangun oleh sekolah. Pemberian ruang partisipasi yang lebih besar dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya rasa memiliki terhadap kegiatan, sehingga peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan karena kewajiban, tetapi juga memiliki kesadaran untuk terlibat dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungannya.

Dengan demikian, novelty penelitian ini dapat diletakkan pada dua aspek utama. Pertama, penelitian mengkaji pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam konteks sekolah multireligius yang memberikan ruang terhadap keberagaman praktik keagamaan, bukan hanya berfokus pada pembinaan religiusitas dalam satu kelompok agama. Kedua, penelitian menunjukkan adanya pergeseran posisi peserta didik dari sekadar penerima kegiatan menjadi pihak yang memiliki peran dan kemandirian dalam pengelolaan kegiatan keagamaan. Kedua temuan tersebut memperluas kajian penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan keagamaan di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

program dan tingkat minat peserta didik, tetapi juga oleh kemampuan sekolah mengelola keberagaman serta memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi peserta didik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin merupakan proses yang terencana, berkelanjutan, dan memiliki fungsi multidimensional. Kegiatan tersebut berperan dalam membentuk kebiasaan religius, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, serta kemandirian peserta didik. Keberadaan lima agama dalam satu lingkungan sekolah justru menjadi ruang pembelajaran sosial bagi peserta didik untuk memahami dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, praktik yang ditemukan di SMAN 7 Banjarmasin memperlihatkan bahwa kegiatan keagamaan dapat dikembangkan bukan hanya sebagai sarana pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan penguatan budaya sekolah yang inklusif dalam lingkungan pendidikan yang multireligius.

2. Problematika yang Terjadi Pada Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin

Poin kedua yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai problematika pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, tetapi juga muncul dari aspek koordinasi, kesiapan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan keagamaan peserta didik, kondisi psikologis, serta

persoalan administratif dan pembiayaan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam lingkungan sekolah multireligius membutuhkan pengelolaan yang terencana dan koordinasi yang berkelanjutan agar tujuan pembinaan keagamaan dapat tercapai secara optimal.

Salah satu problematika yang ditemukan berkaitan dengan koordinasi internal dan kemandirian kepanitiaan siswa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Said Hafizi, pemberian kewenangan yang cukup besar kepada peserta didik dalam mengelola kegiatan terkadang menimbulkan kesenjangan antara perencanaan yang telah diarahkan oleh guru dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh panitia siswa. Kemandirian peserta didik memang memberikan dampak positif terhadap pembentukan tanggung jawab, kepemimpinan, dan kreativitas, tetapi pada kondisi tertentu dapat menimbulkan miskomunikasi apabila tidak disertai dengan sistem koordinasi dan pengawasan yang memadai. Peneliti menemukan bahwa perbedaan kemampuan memahami instruksi, pengalaman organisasi, serta daya tangkap antaranggota kepanitiaan dapat memengaruhi kesiapan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kegiatan yang memiliki skala besar seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Permasalahan koordinasi tersebut menunjukkan adanya dilema dalam penerapan konsep kemandirian peserta didik. Di satu sisi, sekolah perlu memberikan ruang kepada siswa agar mampu mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan bertanggung jawab terhadap kegiatan. Namun, di sisi lain, kemandirian tanpa pendampingan yang proporsional dapat menyebabkan kesalahan komunikasi, pembagian tugas yang kurang

jelas, dan ketidaksesuaian antara konsep kegiatan dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab itu, kemandirian siswa dalam kegiatan keagamaan perlu ditempatkan dalam pola pembinaan yang tetap memberikan arahan, monitoring, dan evaluasi dari guru. Dengan pola tersebut, siswa tetap memperoleh pengalaman mengelola kegiatan secara mandiri, tetapi risiko kesalahan teknis maupun organisatoris dapat diminimalkan.

Problematika berikutnya ditemukan pada aspek sarana dan prasarana penunjang kegiatan keagamaan. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari peserta didik, salah satu fasilitas yang masih menjadi kendala adalah kualitas *sound system*, khususnya ketika kegiatan dilaksanakan di ruang terbuka. KP mengungkapkan adanya kendala terkait kualitas suara yang terkadang kurang optimal ketika digunakan dalam kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut dapat menghambat peserta didik dalam mengikuti rangkaian kegiatan, terutama ketika kegiatan melibatkan penyampaian ceramah, pembacaan ayat suci, doa bersama, maupun instruksi dari panitia. Keterbatasan teknis semacam ini terlihat sederhana, tetapi dalam kegiatan yang melibatkan banyak peserta didik dapat memberikan pengaruh terhadap keteraturan dan kekhusyukan pelaksanaan kegiatan.

Selain persoalan *sound system*, kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi faktor eksternal yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan di ruang terbuka. Hujan, panas yang berlebihan, maupun perubahan kondisi cuaca secara tiba-tiba dapat menyebabkan kegiatan harus

disesuaikan, dipindahkan, atau bahkan mengalami keterlambatan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan program dan sumber daya manusia, tetapi juga oleh kondisi lingkungan serta kesiapan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki alternatif tempat dan strategi teknis yang dapat digunakan ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan. Perencanaan cadangan menjadi penting agar kegiatan tetap dapat berlangsung tanpa mengurangi kenyamanan dan kekhusyukan peserta didik.

Ketersediaan fasilitas juga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan dalam pelayanan keagamaan. Sarana yang memadai tidak semata-mata berfungsi sebagai fasilitas teknis, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan sekolah terhadap kebutuhan peserta didik dalam menjalankan keyakinannya. Ketika fasilitas tidak tersedia secara memadai, peserta didik dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan keagamaan dengan nyaman. Oleh karena itu, pengembangan sarana dan prasarana keagamaan perlu mempertimbangkan kebutuhan seluruh warga sekolah, bukan hanya kelompok agama yang jumlahnya dominan. Dalam konteks sekolah multireligius, pemerataan fasilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Problematika yang lebih kompleks ditemukan pada pemenuhan kebutuhan keagamaan kelompok minoritas, khususnya peserta didik yang beragama Hindu. Berdasarkan keterangan NC, terdapat kendala berupa belum tersedianya guru agama Hindu secara tetap serta belum adanya ruang

khusus yang dapat digunakan untuk kegiatan atau doa keagamaan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan pembinaan keagamaannya harus dipenuhi melalui kegiatan di luar sekolah, seperti mengikuti kegiatan "Sekolah Minggu" di Pura dengan biaya yang ditanggung secara mandiri. Temuan ini menjadi salah satu persoalan penting karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara semangat toleransi yang telah dibangun sekolah dengan pemenuhan fasilitas dan layanan keagamaan secara konkret.

Keberadaan kelompok agama minoritas dalam suatu lingkungan sekolah menuntut adanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan setiap kelompok. Toleransi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemberian kebebasan untuk menjalankan ibadah, tetapi juga perlu didukung oleh akses yang proporsional terhadap pembelajaran agama, tenaga pendidik, tempat ibadah atau ruang keagamaan, serta kegiatan pembinaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, kondisi yang dialami peserta didik Hindu menunjukkan bahwa masih terdapat aspek administratif dan struktural yang perlu diperbaiki. Sekolah telah menunjukkan komitmen terhadap kehidupan yang toleran, tetapi pemenuhan hak keagamaan kelompok minoritas masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dari pihak sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan.

Temuan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa toleransi dan pemerataan pelayanan keagamaan merupakan dua hal yang saling berkaitan tetapi tidak selalu berjalan secara otomatis. Sekolah dapat

memiliki budaya toleransi yang baik dalam interaksi sehari-hari, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi keterbatasan dalam menyediakan fasilitas dan tenaga pendidik agama bagi kelompok minoritas. Dengan demikian, problematika pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin tidak dapat dilihat hanya dari persoalan teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga perlu dikaji dari aspek keadilan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Selain persoalan teknis dan fasilitas, penelitian juga menemukan adanya problematika psikologis yang berkaitan dengan keberagaman keyakinan. MJ mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan mengenai kitab suci dan pemahaman teologis terkadang dapat menimbulkan keraguan atau berkurangnya rasa percaya antarpeserta didik apabila tidak disikapi melalui komunikasi yang sehat. Dalam lingkungan sekolah yang dihuni oleh peserta didik dengan latar belakang agama berbeda, perbedaan keyakinan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan. Persoalan yang perlu dikelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi prasangka, sikap eksklusif, ataupun konflik antarsiswa.

Oleh karena itu, dialog dan komunikasi terbuka menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengelolaan kegiatan keagamaan di lingkungan multireligius. Peserta didik perlu memperoleh pemahaman bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi sumber pertentangan, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk belajar mengenai keberagaman. Dalam konteks ini, sekolah memiliki peran penting dalam membangun batas yang

jelas antara pemahaman keagamaan pribadi dengan sikap sosial terhadap pemeluk agama lain. Pembinaan toleransi perlu diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus kehilangan identitas dan keyakinan agamanya sendiri.

Problematika lainnya terdapat pada aspek administratif dan pembiayaan kegiatan keagamaan. Ketergantungan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyebabkan ruang gerak sekolah dalam membiayai kegiatan yang bersifat spontan atau membutuhkan anggaran tambahan menjadi relatif terbatas. Sistem pengelolaan dana sekolah memiliki ketentuan dan peruntukan tertentu sehingga tidak semua kebutuhan kegiatan dapat dibiayai secara fleksibel. Kondisi ini dapat menjadi kendala ketika muncul kebutuhan teknis yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dalam perencanaan awal, seperti kebutuhan perlengkapan tambahan, penyesuaian tempat, atau kebutuhan kegiatan keagamaan yang muncul secara situasional.

Keterbatasan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan guru dan peserta didik, tetapi juga oleh kemampuan sekolah mengelola sumber daya yang tersedia. Perencanaan anggaran yang matang, penentuan prioritas, serta koordinasi antara pihak sekolah dan panitia siswa menjadi penting agar kegiatan dapat terlaksana sesuai tujuan tanpa melanggar ketentuan penggunaan anggaran. Dengan demikian, problematika finansial bukan sekadar persoalan kekurangan dana,

melainkan juga berkaitan dengan fleksibilitas pengelolaan anggaran dan kemampuan manajemen sekolah dalam menyesuaikan kebutuhan kegiatan dengan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa problematika pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin memiliki karakter yang *multidimensional*. Permasalahan tersebut mencakup aspek koordinasi dan manajerial, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, pemerataan pelayanan keagamaan, psikologis peserta didik, hingga administrasi dan pembiayaan. Setiap persoalan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang berbeda pula. Problematika koordinasi dapat diatasi melalui pendampingan dan evaluasi, kendala fasilitas melalui peningkatan sarana dan perencanaan teknis, persoalan kelompok minoritas melalui pemerataan layanan keagamaan, sedangkan persoalan psikologis dapat diminimalkan melalui dialog dan penguatan pendidikan toleransi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin bukan terletak pada ketiadaan program atau lemahnya komitmen terhadap kehidupan religius, melainkan pada bagaimana program tersebut dapat dikelola secara efektif dalam kondisi sekolah yang memiliki keberagaman agama dan tingkat kemandirian siswa yang cukup tinggi. Kondisi ini sekaligus menjadi gambaran bahwa semakin kompleks lingkungan pendidikan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem manajemen yang mampu menyeimbangkan

antara kemandirian siswa, pengawasan guru, pemerataan fasilitas, penghormatan terhadap keberagaman, serta keterbatasan administratif dan finansial. Oleh karena itu, penyelesaian problematika kegiatan keagamaan perlu diarahkan bukan hanya untuk memastikan kegiatan terlaksana, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh pengalaman keagamaan yang aman, nyaman, adil, dan sesuai dengan hak serta keyakinannya masing-masing.

3. Solusi serta Upaya Penyelesaian Problematika dalam Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang Terjadi di SMAN 7 Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 7 Banjarmasin telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui kebijakan formal sekolah, tetapi juga melalui pendekatan persuasif, penguatan peran peserta didik, pengembangan kerja sama lintas agama, optimalisasi sumber pembiayaan, serta penciptaan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Berbagai strategi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian problematika kegiatan keagamaan tidak dilakukan dengan satu metode saja, melainkan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

Salah satu upaya yang cukup menonjol ditemukan dalam pembinaan kedisiplinan ibadah salat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Said Hafizi, sekolah mulai mengarahkan pola pembinaan dari pendekatan yang bersifat memaksa atau memberikan hukuman menuju pendekatan persuasif

yang menumbuhkan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Perubahan pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pelaksanaan ibadah yang dilakukan karena tekanan cenderung menghasilkan kepatuhan yang bersifat sementara dan formal. Sebaliknya, ketika peserta didik memahami alasan, manfaat, serta nilai yang terkandung dalam ibadah, muncul peluang yang lebih besar bagi terbentuknya tanggung jawab dan kesadaran pribadi.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam pembinaan keagamaan, yaitu dari ketaatan yang bersifat eksternal menuju kesadaran yang bersifat internal. Guru tidak semata-mata bertindak sebagai pihak yang memberikan sanksi kepada peserta didik yang belum menjalankan ibadah, tetapi berperan sebagai pembimbing yang memberikan pemahaman dan motivasi. Dalam perspektif pembentukan karakter, pola seperti ini lebih memungkinkan terbentuknya karakter religius yang melekat dalam diri peserta didik karena kedisiplinan tidak hanya muncul akibat adanya pengawasan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang didasarkan pada kesadaran pribadi. Dengan demikian, strategi persuasif menjadi salah satu upaya sekolah untuk menghindari terbentuknya perilaku keagamaan yang hanya bersifat formalitas.

Upaya penyelesaian juga dilakukan dalam menghadapi problematika pembiayaan kegiatan keagamaan. Keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana BOS mendorong sekolah dan peserta didik untuk mencari alternatif sumber pembiayaan, antara lain melalui donatur eksternal dan dana Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Strategi diversifikasi

sumber pendanaan tersebut menjadi salah satu bentuk adaptasi sekolah terhadap keterbatasan anggaran. Peserta didik tidak hanya menunggu ketersediaan dana dari sekolah, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam memperoleh dukungan bagi kegiatan yang mereka rancang.

Menariknya, proses tersebut tidak hanya memberikan manfaat dari sisi finansial, tetapi juga memiliki nilai pendidikan. Keterlibatan peserta didik dalam mencari dukungan pendanaan dapat melatih kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, menyusun perencanaan, menyampaikan proposal, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Dengan demikian, proses penggalangan dukungan dapat menjadi pengalaman praktis yang mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, diplomasi, dan kewirausahaan. Dalam konteks sekolah multireligius, kesempatan tersebut dapat diberikan secara proporsional kepada kelompok keagamaan yang berbeda sehingga setiap kelompok memiliki ruang untuk mengembangkan programnya.

Selain mencari sumber pendanaan alternatif, sekolah juga menerapkan mekanisme pengajuan anggaran melalui bidang kesiswaan sebagai salah satu upaya untuk menjaga pemerataan kesempatan antarkelompok agama. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah direncanakan. Usulan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme perencanaan anggaran sekolah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam

RKAS. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan kegiatan keagamaan diarahkan pada prinsip kesetaraan kesempatan. Artinya, keberadaan suatu kelompok sebagai mayoritas atau minoritas tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup kesempatan kelompok tersebut dalam mengusulkan dan melaksanakan kegiatan keagamaannya.

Upaya struktural yang juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah pembentukan Sekbit 1 di bawah OSIS yang melibatkan perwakilan dari beberapa kelompok agama. Keberadaan struktur tersebut memberikan ruang bagi peserta didik dari latar belakang agama yang berbeda untuk terlibat dalam satu sistem organisasi yang sama. Perwakilan dari Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha dapat berkoordinasi dalam merencanakan kegiatan, menyampaikan aspirasi, serta membahas berbagai kebutuhan kelompok masing-masing. Struktur ini menjadi salah satu instrumen yang membantu sekolah mengatasi persoalan koordinasi yang sebelumnya muncul dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Sekbit 1 tidak hanya berfungsi sebagai struktur organisasi, tetapi juga dapat dipandang sebagai ruang komunikasi lintas agama. Melalui keterlibatan peserta didik dari berbagai latar belakang keagamaan, perbedaan kebutuhan dapat dibicarakan secara langsung dan terbuka. Aspirasi kelompok minoritas juga memiliki jalur komunikasi yang lebih jelas kepada organisasi siswa dan pihak sekolah. Dengan demikian, mekanisme organisasi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat koordinasi

antarpeserta didik. Model ini sekaligus menunjukkan bahwa organisasi siswa dapat menjadi bagian penting dari strategi sekolah dalam membangun kehidupan keagamaan yang inklusif.

Dalam menghadapi persoalan toleransi dan potensi munculnya prasangka antarpeserta didik, sekolah juga menerapkan toleransi aktif melalui keterlibatan peserta didik lintas agama dalam berbagai kegiatan. Salah satu bentuknya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik non-Muslim untuk terlibat dalam kepanitiaan kegiatan PHBI, misalnya sebagai sekretaris, bagian dokumentasi, maupun tugas kepanitiaan lainnya. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk menjalankan agamanya, tetapi juga melalui kerja sama nyata dalam kegiatan sosial dan organisasi.

Interaksi lintas agama yang terjadi melalui kerja sama kepanitiaan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan teman yang memiliki latar belakang keyakinan berbeda. Interaksi semacam ini dapat membantu mengurangi prasangka karena peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan tugas bersama. Dengan demikian, perbedaan agama tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi dialami sebagai bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Dalam konteks tersebut, budaya saling menghormati yang terus ditekankan oleh guru menjadi faktor penting dalam menjaga agar perbedaan tidak berkembang menjadi

diskriminasi atau konflik.

Upaya lain yang menarik ditemukan dalam pelaksanaan Pesantren Ramadan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan pada pembinaan ritual keagamaan, tetapi juga dikembangkan menjadi kegiatan yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM lokal. Salah satu bentuknya adalah pembelian atau pemborongan takjil dari pedagang di sekitar lingkungan sekolah. Inovasi ini menunjukkan adanya perluasan makna kegiatan keagamaan, dari kegiatan yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pemahaman dan praktik ibadah menjadi kegiatan yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengembangan Pesantren Ramadan menjadi kegiatan yang memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat memberikan pengalaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial. Peserta didik memperoleh pemahaman bahwa ibadah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kegiatan keagamaan menjadi lebih kontekstual karena menghubungkan nilai religius dengan realitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga dapat mengurangi kejenuhan peserta didik terhadap pola kegiatan keagamaan yang hanya bersifat ritual dan berulang.

Di sisi lain, penerapan kegiatan tersebut tetap memperhatikan hak peserta didik non-Muslim. Peserta didik yang tidak memiliki kewajiban mengikuti kegiatan Pesantren Ramadan tidak dipaksakan untuk

berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan Islam. Mereka diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan keagamaannya masing-masing secara paralel. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menjaga keseimbangan antara pembinaan keagamaan kelompok mayoritas dengan penghormatan terhadap hak kelompok minoritas. Dengan demikian, penguatan kegiatan keagamaan mayoritas tidak harus dilakukan dengan mengurangi ruang bagi peserta didik dari agama lain.

Jika dilihat secara keseluruhan, berbagai upaya yang dilakukan sekolah memperlihatkan bahwa penyelesaian problematika kegiatan keagamaan dilakukan melalui kombinasi antara pendekatan persuasif, penguatan kelembagaan, partisipasi siswa, pemerataan kesempatan, dialog lintas agama, serta inovasi kegiatan. Pendekatan persuasif digunakan untuk membangun kesadaran dalam menjalankan ibadah, mekanisme organisasi digunakan untuk memperbaiki koordinasi, alternatif pendanaan digunakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, sedangkan keterlibatan lintas agama digunakan untuk memperkuat toleransi dan mengurangi prasangka. Pola tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berusaha menyelesaikan masalah setelah muncul, tetapi juga mengembangkan mekanisme pencegahan agar permasalahan yang sama tidak terus berulang.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya penyelesaian tersebut belum sepenuhnya menghilangkan seluruh problematika. Masih terdapat persoalan dalam pemerataan fasilitas, khususnya bagi peserta didik dari kelompok agama dengan jumlah yang

lebih sedikit, serta kendala teknis dalam penyediaan sarana prasarana kegiatan. Oleh karena itu, keberhasilan sekolah dalam membangun budaya toleransi perlu diikuti dengan perbaikan pada aspek struktural dan fasilitas. Komitmen terhadap inklusivitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga perlu didukung oleh kebijakan, fasilitas, dan layanan yang memungkinkan setiap peserta didik memperoleh hak keagamaannya secara proporsional.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen kegiatan keagamaan di SMAN 7 Banjarmasin telah berjalan secara rutin, terstruktur, partisipatif, dan inklusif, meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan. Sekolah mampu memanfaatkan kemandirian peserta didik sebagai kekuatan dalam penyelenggaraan kegiatan, sementara guru tetap menjalankan fungsi pengarahan dan pengawasan. Sinergi antara kebijakan sekolah dan partisipasi siswa menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Dalam konteks sekolah multireligius, pola tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman membutuhkan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, koordinasi, dan pengawasan.

Pada akhirnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa budaya sekolah (school culture) menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mengelola keberagaman agama. Budaya sekolah yang dibangun melalui kebiasaan saling menghormati, keterbukaan komunikasi, partisipasi siswa, dan keteladanan guru menciptakan lingkungan yang memungkinkan

setiap peserta didik merasa diterima sebagai bagian dari komunitas sekolah. Bahkan ketika sekolah masih menghadapi keterbatasan tertentu dalam aspek fasilitas, budaya inklusif dapat menjadi modal sosial yang menjaga hubungan antarpeserta didik tetap harmonis.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan kegiatan keagamaan dalam lingkungan sekolah multireligius tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi oleh cara sekolah membangun sistem yang mampu mengakomodasi perbedaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki di antara seluruh warga sekolah. Pemberian kepercayaan kepada peserta didik, pendampingan yang proporsional dari guru, keterbukaan terhadap aspirasi kelompok minoritas, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip kesetaraan menjadi unsur penting dalam membangun kehidupan sekolah yang harmonis. Dalam konteks SMAN 7 Banjarmasin, keberagaman agama tidak hanya menjadi kondisi yang harus dikelola, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran sosial yang dapat membentuk peserta didik agar memiliki karakter religius, mandiri, toleran, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk.